PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Selain berbagai peluang yang hadir bersama internet dan perkembangan teknologi digital dalam masyarakat, ada tantangan yang datang bersamanya. Dalam konteks demokrasi, internet dipandang bisa menghasilkan peluang untuk membuka sekat-sekat sehingga membebaskan arus pertukaran informasi sebagai salah satu unsur penting bagi demokrasi. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital berbasis *surveillance* membawa tantangan bahkan ancaman yang bisa menutup peluang kebebasan informasi itu. Di Indonesia, peluang dan ancaman itu hadir hampir bersamaan sehingga antusiasme terhadap teknologi digital berhimpitan dengan sikap skeptis terhadapnya. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kelompok yang bersikap skeptis terhadap teknologi digital, khususnya berupa teknologi digital berbasis *surveillance*, menyikapi perkembangan tersebut. Menggunakan kerangka teori *assemblage* dari Deleuze dan Guatarri, penelitian ini menunjukkan bahwa internet yang pernah dipandang sebagai ruang alternatif di tengah pembatasan informasi dan komunikasi di masa Orde Baru kini pelan-pelan diambil negara pasca-Orde Baru melalui praktik *surveillance* digital yang didukung serangkaian regulasi dan kebijakan. Jika dilihat dari teori tentang normalisasi kedaruratan dari Agamben, tampak bahwa praktik *surveillance* digital itu merupakan bentuk dari pengabaian negara terhadap kewajiban untuk melindungi privasi warga. Meskipun demikian, kehadiran kelompok yang skeptis terhadap teknologi digital telah membentuk garis deteritorialisasi yang menghambat upaya reteritorialisasi kekuasaan tersebut.

Kata kunci: *surveillance* digital, teknologi digital, relasi kuasa, resistensi, gerakan sosial, demokrasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Abstract

In the context of democracy, the internet is considered as a significant factor to maintain free access to information and communication as an important aspect of democracy. On the other side, the development of digital technology-based surveillance has become a real challenge for democracy. In Indonesia, those opportunities and challenges are present at the same time, together with the optimism and scepticism that revolve around it. This research focuses to understand those who chose to be sceptical. Using assemblage theory from Deleuze and Guattari, this research shows that the alternative space provided by the internet during the information and communication limitation in the New Order era has slowly being taken over by the post-New Order state to restore its control through digital surveillance practises which are combined by a series of policies and regulations. From Agamben's state of exception theory, it can be concluded that by doing digital surveillance or allowing other parties to do the same thing to the citizen, the state has neglected its own law to protect the privacy of the citizen. By neglecting the law, the state gains its control and power. However, the resistance from the sceptical individuals and groups has created a line of deterritorialization which able to hamper the reterritorialization process of the state power.

Key words: digital surveillance, digital technology, power relation, resistance, social movement, democracy